

# Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik

**Ajrina Rizkiananda Rusmana; Audrey Abigail; Illene Clarita Tantonio; Virya Vienny Vici; Universitas Pradita, [ajrina.rizkiananda@student.pradita.ac.id](mailto:ajrina.rizkiananda@student.pradita.ac.id)**

*ABSTRACT: This study examines the phenomenon of political dynasties in Indonesia from the perspective of political ethics, aiming to uncover the reality, impact, and relevant solutions to this issue. Through a literature review approach, we analyze relevant literature on political dynasties and political ethics, identifying patterns, trends, and underlying characteristics. The findings highlight that political dynasties, characterized by the dominance of political families in decision-making, have significant negative impacts on democratic principles, justice, accountability, and public participation. However, several proposed solutions, such as political reforms and the role of civil society, can mitigate the negative effects of political dynasties and promote better political ethics. In conclusion, concrete and comprehensive actions are needed to strengthen an inclusive, transparent, and just political system in Indonesia, thereby reinforcing the foundation of democracy for a better future.*

*KEYWORDS: Political Dynasties, Political Ethics, Political Reform, Democracy*

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas fenomena dinasti politik di Indonesia dari perspektif etika politik, dengan tujuan untuk mengungkap realitas, dampak, serta solusi yang relevan terhadap masalah ini. Melalui pendekatan kajian pustaka, kami menganalisis literatur yang relevan tentang dinasti politik dan etika politik, serta mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik yang mendasarinya. Hasil kajian menyoroti bahwa dinasti politik, yang ditandai oleh dominasi keluarga-keluarga politik dalam pengambilan keputusan politik, memiliki dampak negatif signifikan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Meskipun demikian, beberapa solusi yang diusulkan, seperti reformasi politik dan peran masyarakat sipil, dapat mengurangi dampak negatif dinasti politik dan mempromosikan prinsip-prinsip etika politik yang lebih baik. Kesimpulannya, tindakan konkret dan komprehensif diperlukan untuk memperkuat sistem politik yang inklusif, transparan, dan berkeadilan di Indonesia, guna memperkuat fondasi demokrasi untuk masa depan yang lebih baik.

**KATA KUNCI:** Dinasti Politik, Etika Politik, Reformasi Politik, Demokrasi



## I. PENDAHULUAN

Dinasti politik merupakan fenomena yang umum terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Dinasti politik terjadi ketika keluarga atau kerabat dekat seorang pemimpin politik yang sedang berkuasa secara terus-menerus memegang jabatan publik yang sama atau berbeda dalam jangka waktu yang lama. Fenomena ini dapat mempengaruhi stabilitas politik, demokrasi, dan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinasti politik dan dampaknya pada sistem politik suatu negara. Menurut studi yang dilakukan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2019, sebanyak 40% dari 167 negara yang disurvei memiliki dinasti politik yang signifikan. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan dinasti politik cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki dinasti politik (Intelligence, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahlquist *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa dinasti politik dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara. Penelitian tersebut menemukan bahwa negara-negara dengan dinasti politik cenderung mengalami lebih banyak konflik politik dan kekerasan daripada negara-negara yang tidak memiliki dinasti politik.

Dinasti politik telah menjadi ciri khas yang tak terelakkan dalam pandangan politik Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era demokrasi modern, praktik politik yang ditandai oleh dominasi keluarga-keluarga politik telah membentuk lanskap politik yang kompleks dan kadang kontroversial di berbagai wilayah di Indonesia (Yusuf, 2021). Fenomena ini mencakup berbagai aspek, termasuk penguasaan kekuasaan, pengaruh ekonomi, dan pola perilaku politik yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya (Schaar, 2024). Pada konteks politik di Indonesia, dinasti politik adalah fenomena yang sedang marak terjadi, seperti di contoh dengan kasus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Gibran, yang awalnya adalah seorang pengusaha katering, tiba-tiba memasuki kancah perpolitikan Indonesia dan bahkan berhasil terpilih menjadi Wali Kota Solo, jabatan yang pernah diemban oleh Ayahnya, Presiden Jokowi. Langkah ini

disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Presiden Jokowi dalam membangun dinasti politiknya di Indonesia. Meskipun Gibran memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, namun dukungan dan koneksi dari ayahnya, Presiden Jokowi, memberikan modal politik yang kuat bagi Gibran (Ahmalia *et al.*, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas dinasti politik di Indonesia secara komprehensif. Kami akan mengidentifikasi pola-pola dan karakteristik yang mendasarinya, serta menganalisis dampaknya secara menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini tidak akan terbatas pada analisis deskriptif dan empiris semata. Kami juga akan meninjau fenomena dinasti politik dari perspektif etika politik. Etika politik, sebagai kerangka konseptual yang mengatur perilaku politik, akan menjadi landasan dalam mengevaluasi praktik-praktik yang terkait dengan dinasti politik ini. Etika politik terkait dinasti politik berkaitan dengan prinsip - prinsip moral dan keadilan dalam pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi moral dari fenomena dinasti politik di Indonesia. Selain itu, kami juga akan mencari solusi atau mekanisme yang dapat mengurangi dampak dinasti politik, serta mempromosikan prinsip-prinsip etika politik yang lebih baik dalam praktek politik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinasti politik, etika politik, dan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks sejarah, politik, dan sosial yang kompleks, kami berharap dapat membuka jalan bagi diskusi yang lebih mendalam dan konstruktif tentang masa depan politik Indonesia, serta memperkuat fondasi demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.

## II. METODE

Penelitian ini mengungkap realitas dan dampak dari dinasti politik di Indonesia dari perspektif etika politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup kajian pustaka sebagai landasan

utama (Widiarsa, 2019). Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini (Widiarsa, 2019). Kajian pustaka memberikan dasar pengetahuan yang solid dengan menyelidiki literatur yang relevan tentang topik tertentu, membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan mengembangkan konsep (Hariyanto et al., 2020). Pendekatan ini akan menyusun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena dinasti politik, baik dari sudut pandang sejarah maupun analisis teoritis yang mendalam (Pratama et al., 2023). Pertama-tama, kami akan melakukan kajian pustaka yang menyeluruh tentang literatur yang relevan terkait dengan dinasti politik di Indonesia. Kajian ini mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang memaparkan berbagai aspek dinasti politik, termasuk asal usul, perkembangan historis, dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola negara. Selanjutnya, kami akan mengeksplorasi literatur tentang etika politik, dengan fokus pada konsep-konsep seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kajian ini akan membantu kami dalam membangun kerangka analisis yang memungkinkan evaluasi terhadap praktik-praktik yang terkait dengan dinasti politik dari sudut pandang moral dan etis. Pendekatan kajian pustaka ini akan mengumpulkan data sekunder yang relevan dan mendalam, serta untuk menganalisis dan menafsirkan informasi yang ada dengan cermat (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Dengan demikian, kami dapat membangun argumen yang kokoh dan menyeluruh tentang dinasti politik di Indonesia dari perspektif etika politik, serta mengidentifikasi implikasi dan solusi yang relevan untuk konteks politik saat ini.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Etika Politik**

Etika merupakan eksplorasi yang kritis dan mendalam terhadap konsep-konsep moral. Ini adalah bidang pengetahuan yang mempelajari alasan di balik pematuhan kita terhadap aturan moral tertentu, serta cara

kita harus bertindak dengan tanggung jawab terhadap berbagai norma moral. Seorang filsuf moral, sebagai contoh, biasanya menggunakan tiga alat utama: memahami terminologi moral, dasar-dasar logis dari suatu kerangka etika, dan penilaian rasional terhadap proses pemikiran moral. Alat-alat ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pernyataan-pernyataan moral yang dipelajari. Di sisi lain, etika khusus memperdalam prinsip-prinsip ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini terbagi menjadi dua cabang utama: etika individual, yang mempertimbangkan kewajiban individu terhadap diri sendiri, dan etika sosial, yang mengeksplorasi tanggung jawab manusia terhadap orang lain dalam masyarakat, yang merupakan fokus utama dari bidang etika khusus.

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, *politeia*, yang bermakna kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (*polis*) dan urusan (*teia*). Pengertian politik telah berkembang luas sehingga sulit untuk menemukan makna yang tunggal. Max Weber mendefinisikan politik sebagai sarana untuk memperjuangkan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik di antara negara maupun di dalam suatu negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan politik sebagai ilmu yang mengajarkan tentang ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan atau segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dalam suatu negara atau antara negara-negara. Lane W., seorang ahli politik, membagi politik menjadi dua kategori: politik sebagai ilmu dan politik sebagai filsafat. Politik sebagai ilmu berfokus pada pemahaman untuk mengatur sistem pemerintahan dalam suatu negara, sementara politik sebagai filsafat lebih menekankan pada permasalahan fundamental, hakikat, dan tujuan ideal negara.

Dalam konteks ketatanegaraan, istilah politik berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, serta kekuasaan negara. Politik pada dasarnya mengenai tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan individu. Hal ini sering terkait dengan kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Secara ringkas, politik adalah beragam kegiatan dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu entitas politik (negara), meliputi proses

penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan dengan kebijakan umum, dan pengaturan yang mengikat untuk kebaikan bersama masyarakat di wilayah tertentu. Etika terkait dengan norma moral yang digunakan untuk menilai kebenaran atau kesalahan tindakan manusia sebagai individu. Dalam konteks politik, etika menyoroti tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia itu sendiri, bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan aspek lainnya.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada menyediakan alat-alat teoretis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Pendekatannya bukan berdasarkan emosi, prasangka, atau asumsi sebelumnya, melainkan bersifat rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung campur tangan dalam politik praktis; perannya adalah membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dilakukan secara objektif. Diskusi utama dalam etika politik melibatkan hukum dan kekuasaan negara. Hukum dipandang sebagai institusi penata masyarakat yang menetapkan norma, sedangkan kekuasaan negara sebagai institusi penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur kemampuan manusia sebagai individu dan sosial. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi pedoman moral bagi suatu negara meliputi prinsip the Rule of Law, partisipasi demokratis masyarakat, perlindungan HAM berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, serta keterkaitan dengan struktur kebudayaan dan kondisi sosial masyarakat masing-masing (Pureklolon, 2020).

Etika politik berkaitan erat dengan dinasti politik dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan. Dinasti politik merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik atau jabatan-jabatan penting diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga atau kelompok yang berkuasa. Hubungan antara etika politik dan dinasti politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:

1. Legitimasi Kekuasaan: Etika politik mengajukan pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan. Dalam dinasti politik, pertanyaan tentang legitimasi muncul karena kekuasaan seringkali diwariskan secara turun-temurun. Sumber legitimasi ini dapat berasal dari

faktor historis, budaya, atau pembenaran etis yang diterima oleh masyarakat.

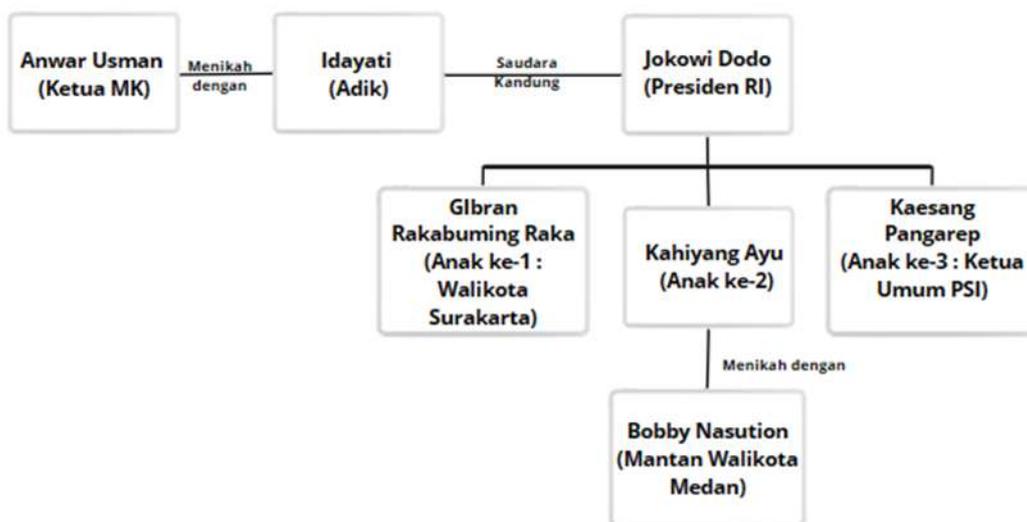
2. Keadilan dan Kesetaraan: Etika politik menyoroti masalah keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan. Dinasti politik sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan akses terhadap kekuasaan politik. Apakah pemerintahan dinasti memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi politik penting?
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Etika politik menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks dinasti politik, transparansi seringkali menjadi isu karena ada kecenderungan untuk menjaga kebijakan internal dan keputusan politik di dalam keluarga atau kelompok yang berkuasa, tanpa keterbukaan yang memadai kepada publik.
4. Pendidikan Politik: Etika politik juga berkaitan dengan pendidikan politik dan kesadaran partisipasi politik masyarakat. Dinasti politik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang proses politik dan dampaknya terhadap partisipasi politik yang sehat dan demokratis.

## **B. Dinasti Politik Jokowi**

Fenomena dinasti politik menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keadilan politik. Keadilan dalam hal ini berkaitan dengan distribusi yang adil dari kekuasaan politik. Namun, dinasti politik sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan politik, di mana keluarga-keluarga politik mendominasi panggung politik sementara peserta politik lainnya, terutama mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan elite politik, seringkali terpinggirkan atau memiliki akses yang terbatas (Jha, 2020). Hal ini dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi dan merugikan kesetaraan politik. Praktik dinasti politik yang dapat ditinjau berasal dari dinasti politik Jokowi, yang dapat diamati sejak tahap penjarangan dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri menjadi Walikota Surakarta

hingga kepemimpinannya di Kota Surakarta. Bahkan, semakin diperkuat dengan proses Gibran menjadi Calon Wakil Presiden RI dari Prabowo Subianto, yang merupakan oposisi dari partai pengusung Gibran pada pilihan wali kota Surakarta tahun 2020, yaitu PDI-Perjuangan. Semua peristiwa ini saling terkait dan membentuk gambaran yang menjelaskan motif dinasti politik Joko Widodo (Yani, 2022).

Joko Widodo menerapkan konsep dinasti politik untuk menjaga fitrahnya sebagai pejabat di Indonesia. Dengan adanya dinasti yang dibangun oleh Jokowi akan memberikan kemudahan bagi Gibran untuk mendapatkan legitimasi dan meningkatkan elektabilitasnya sebagai tokoh publik yang relatif baru. Peran Jokowi dalam membangun citra Gibran sebagai Walikota Surakarta menjadi krusial, terutama dengan kewenangannya dalam menyetujui Proyek Strategis Nasional, yang menjadi salah satu wewenang yang dimiliki oleh Presiden RI (Ahmalia et al., 2024). Praktik dinasti politik dapat membatasi demokrasi dan memunculkan konflik kepentingan, terutama dalam konteks kenaikan nama Gibran sebagai Calon Wakil Presiden melalui keputusan MK yang dianggap kontroversial. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik, meskipun memberikan kestabilan dalam kepemimpinan, juga dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan prinsip-prinsip good governance.



(Gambar I. Bagan Silsilah Dinasti Politik Jokowi)

Berdasarkan jenis dinasti politiknya, dinasti Jokowi dapat diklasifikasikan sebagai dinasti octopussy yang berfokus pada jaringan kekuasaan. Di lingkup pemerintahan, anggota dan kerabat Jokowi mengisi berbagai jabatan politik di sektor eksekutif dan yudikatif. Di bidang eksekutif, contohnya adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi, yang menjabat sebagai Wali Kota Medan periode 2021-2024. Sementara itu, Anwar Usman, adik ipar Jokowi yang juga suami dari Idayati, menduduki posisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain menduduki jabatan formal di sektor eksekutif dan yudikatif, keluarga dan kerabat Jokowi juga terlibat dalam jabatan informal, seperti dalam asosiasi bisnis dan organisasi pemuda.

Dinasti politik octopussy terbentuk karena kehadiran figur karismatik. Figur karismatik ini memiliki daya tarik dan pengaruh yang mampu mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini, figur karismatik yang dekat dengan Gibran Rakabuming Raka adalah ayahnya, Jokowi. Pengaruh yang kuat dari Jokowi membantu Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya dengan memobilisasi dukungan dari organisasi relawan Jokowi, seperti Pro-Jokowi (Projo) Kota Solo yang siap memberikan dukungan elektoral sebesar 50.000 suara untuk Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, ada juga dukungan dari organisasi relawan Jokowi lainnya seperti Koncone Gibran Gaes (Kagege), Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Relawan Nasional Jokowi (RNJ) 4 G, dan Teman Jokowi 4G. Kerjasama yang baik antara Jokowi dengan elite PDI-Perjuangan juga mempermudah langkah Gibran Rakabuming Raka dalam mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partai tersebut. Pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta silaturahmi antara Gibran Rakabuming Raka dengan Megawati Soekarnoputri menjadi faktor yang memperkuat dinasti politik octopussy ini.

### **C. Dinasti Politik dari Perspektif Etika Politik**

Kajian pustaka yang dilakukan menyoroti dinasti politik sebagai fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam politik Indonesia. Fenomena ini menandai dominasi keluarga-keluarga politik yang memegang kendali politik secara turun-temurun, seringkali dengan

memanfaatkan hubungan keluarga untuk memperkuat kekuasaan dan mempertahankan pengaruh mereka dalam struktur politik dan ekonomi negara (Dedi, 2022). Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika memahami dinasti politik dari perspektif etika politik. Analisis terhadap dinasti politik dari perspektif etika politik menyoroti kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik politik. Dinasti politik cenderung menghasilkan sistem politik yang tertutup dan sulit dipantau oleh masyarakat umum. Kekuasaan yang terpusat dalam keluarga-keluarga politik dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik-praktik politik yang tidak etis. Tanpa mekanisme yang memadai untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada sistem politik dan institusi demokrasi (Maslamah & Yusdani, 2022). Dinasti politik juga memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi publik dalam proses politik. Ketika keluarga-keluarga politik mendominasi arena politik, masyarakat yang tidak terafiliasi dengan kelompok tersebut mungkin merasa terpinggirkan atau kurang termotivasi untuk terlibat dalam proses politik (Hudayati, 2020). Hal ini dapat mengurangi pluralitas dan representasi dalam pengambilan keputusan, serta merusak legitimasi sistem politik secara keseluruhan.

Hasil kajian pustaka mengidentifikasi beberapa upaya dan solusi yang diusulkan untuk mengatasi dampak negatif dari dinasti politik. Reformasi politik, termasuk perubahan dalam sistem pemilihan dan penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap praktik politik, dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi dominasi dinasti politik dan meningkatkan akuntabilitas politik. Selain itu, peran masyarakat sipil dan lembaga-lembaga anti-korupsi sangat penting dalam menekan praktik dinasti politik yang merugikan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dinasti politik dan memperjuangkan prinsip-prinsip etika politik yang lebih baik, masyarakat sipil dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam menciptakan tata kelola politik yang lebih transparan dan inklusif (Pangestu & Djohan, 2023). Hasil kajian ini juga menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan dinasti politik di

Indonesia dari perspektif etika politik. Sementara praktik ini dapat memberikan stabilitas politik dan kontinuitas, dampak negatifnya terhadap keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi publik menunjukkan perlunya tindakan yang tepat untuk mempromosikan sistem politik yang lebih demokratis dan etis (Margianto, 2020). Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinasti politik dan upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip etika politik dalam praktik politik, masyarakat Indonesia dapat menuju pada sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Dari perspektif etika politik, fenomena dinasti politik menciptakan sejumlah permasalahan yang mendalam dan menuntut untuk diperhatikan dengan serius. Pertama-tama, aspek ketidakadilan politik menjadi perhatian utama. Dinasti politik menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, di mana keluarga-keluarga politik memiliki akses yang lebih besar terhadap panggung politik daripada peserta politik lainnya. Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu kelompok elit menyebabkan pengambilan keputusan yang cenderung menguntungkan kelompok tersebut, sementara suara dan kepentingan kelompok lain terpinggirkan. Ini melanggar prinsip dasar keadilan politik, yang menuntut distribusi kekuasaan yang adil untuk memastikan partisipasi yang setara dan hak yang sama bagi semua warga negara dalam proses politik (Maulana & Patrianti, 2023).

Kedua, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci dalam pembahasan dinasti politik. Dinasti politik sering kali menciptakan lingkungan politik yang tertutup, di mana keputusan-keputusan politik dibuat dalam lingkungan yang tidak transparan dan sulit dipantau oleh masyarakat. Kekuasaan yang terpusat dalam keluarga-keluarga politik dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik politik yang tidak etis. Tanpa mekanisme yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik, risiko penyalahgunaan kekuasaan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap institusi politik dapat terkikis (Iskandar, 2017). Hal ini merusak esensi demokrasi, di mana pertanggungjawaban kepada publik menjadi

kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, dinasti politik juga berdampak negatif pada partisipasi publik dalam proses politik. Ketika keluarga-keluarga politik mendominasi panggung politik, masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan kelompok elit tersebut cenderung merasa terpinggirkan atau kehilangan motivasi untuk terlibat dalam proses politik (Iskandar, 2017). Hal ini dapat mengurangi pluralitas dalam pengambilan keputusan dan merusak legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Partisipasi publik yang rendah mengancam dasar demokrasi, di mana representasi yang luas dan partisipasi yang aktif dari berbagai kelompok masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan keputusan politik yang adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam kasus Gibran Rakabuming Raka dan dinasti politik Jokowi, intervensi politik dari elit politik yang ada menggambarkan dominasi yang kuat dari satu kelompok elit terhadap proses politik. Ini menunjukkan perlunya reformasi politik yang mendalam, termasuk perubahan dalam sistem pemilihan dan penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap praktik politik, untuk mengurangi dominasi dinasti politik dan meningkatkan akuntabilitas politik. Secara keseluruhan, dinasti politik tidak hanya menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan politik, tetapi juga menggoyahkan fondasi moral dan etika politik. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki sistem politik dengan memperkuat mekanisme demokratis, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan merata sangatlah penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem politik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menggambarkan dinasti politik sebagai fenomena yang kompleks dan kontroversial dalam politik Indonesia. Dinasti politik, yang ditandai oleh dominasi keluarga-keluarga politik dalam

pengambilan keputusan politik dan kontrol atas sumber daya politik dan ekonomi, telah menjadi ciri khas yang tak terelakkan dalam lanskap politik Indonesia dari masa kolonial hingga era demokrasi modern. Meskipun dinasti politik dapat memberikan stabilitas politik dan kontinuitas, penelitian ini menyoroti dampak negatif yang signifikan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dinasti politik yang melibatkan Jokowi dan Gibran menunjukkan fenomena yang semakin merajalela di politik Indonesia. Meskipun dinasti ini dapat membawa kemajuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dikelola oleh anggota dinasti, seperti Kota Surakarta, namun juga menimbulkan risiko terhadap demokrasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dinasti politik ini menunjukkan pola yang umum dalam politik dinasti, yaitu upaya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Fenomena ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, dengan implikasi yang dapat mempengaruhi pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil kajian, terungkap bahwa dinasti politik menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan politik, dimana keluarga-keluarga politik mendominasi panggung politik sementara peserta politik lainnya, terutama mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan elite politik, seringkali terpinggirkan atau memiliki akses yang terbatas. Hal ini mengganggu prinsip kesetaraan politik yang mendasari demokrasi. Selain itu, dinasti politik cenderung menghasilkan sistem politik yang tertutup dan sulit dipantau oleh masyarakat umum, meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik politik yang tidak etis. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif dari dinasti politik. Reformasi politik, termasuk perubahan dalam sistem pemilihan dan penguatan mekanisme pengawasan independen terhadap praktik politik, dianggap sebagai langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi dominasi dinasti politik dan meningkatkan akuntabilitas politik. Selain itu, peran masyarakat sipil dan lembaga-lembaga anti-korupsi sangat penting dalam menekan praktik dinasti politik yang merugikan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak

negatif dinasti politik dan memperjuangkan prinsip-prinsip etika politik yang lebih baik. Oleh karena itu, kesimpulan utama adalah perlunya tindakan yang konkret dan komprehensif untuk mempromosikan sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinasti politik dan upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip etika politik dalam praktik politik, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menuju pada tata kelola politik yang lebih demokratis dan etis, serta memperkuat fondasi demokrasi yang lebih kuat dan inklusif untuk masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahlquist, J. S., Mayer, K. R., & Jackman, S. (2014). Alien Abduction and Voter Impersonation in the 2012 U.S. General Election: Evidence from a Survey List Experiment. *Election Law Journal Rules Politics and Policy*, 13(4), 460–475. <https://doi.org/10.1089/elj.2013.0231>
- Ahmalia, A. F., Fitriyah, & Sardini, N. H. (2024). Modal Sosial Dalam Kepemimpinan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka: Studi Politik Dinasti. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 475–489.
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Hariyanto, E., Susylawati, E., Supratiningsih, U., Musawwamah, S., Jalil, A., Wahed, A., Afandi, M., Faidi, A., & Fauzi, A. (2020). Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah. In Fakultas Syariah IAIN Madura. <http://www.syariah.iainmadura.ac.id>
- Hidayati, I. (2020). “Dinasti Politik” Ancaman Penerapan Etika Politik. *Kumparan*. <https://kumparan.com/innanaya123/dinasti-politik-ancaman-penerapan-etika-politik-1usNibfC2bx>
- Intelligence, T. E. (2019). *Democracy Index 2019*. <https://www.eiu.com/>.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Jha, D. A. K. (2020). Training and development program and its benefits to employee and organization: A conceptual study. *International Journal of Research in Human Resource Management*, 2(2), 27–31. <https://doi.org/10.33545/26633213.2020.v2.i2a.43>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

- Margianto, H. (2020). Etika Politik di Politik Dinasti. Nasional Kompas.
- Maslamah, A., & Yusdani. (2022). Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasa Kontemporer. *Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2), 97–110. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>
- Maulana, F., & Patrianti, T. (2023). Politik Dinasti Atau Dinasti Politik? <https://Umj.Ac.Id/>.
- Pangestu, D., & Djohan, G. (2023). Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Atas Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Di Pilkada Solo 2020). xiv–96. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68770>
- Pratama, G. N., Fitriasia, A., & Ofianto. (2023). Fenomena Dinasti Politik dari Perspektif Aksiologis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 3.
- Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia. *Law Review*, 20(1), 71–86.
- Schaar, V. der. (2024). Politik Indonesia. Indonesia Investment. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65?>
- Widiarsa. (2019). Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>
- Yani, B. I. (2022). Opini Publik dan Dinasti Politik.
- Yusuf, M. A. (2021). Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>